

RELEVANSI KELEMBAGAAN ORGANISASI DALAM MENGHADAPI BENCANA DAN PELUANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MAGELANG

Siti Nur Fatimah^{1*}, Jihad Lukis Panjawa²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

Jl. Kapten Suparman No. 39 Kec. Magelang Utara - Kota Magelang - 56116

*Korespondensi Penulis: sitinurf74@gmail.com

Abstract: *Magelang Regency is an area that is prone to disasters with the potential for prosperity that is vulnerable at any time. The location of Magelang Regency which is surrounded by mountains causes disasters to always lurk, especially mountain eruption disasters. Several other disasters also occurred including landslides, floods, hurricanes and other unexpected disasters. Preparedness from various walks of life is needed to anticipate disasters so that the impact received is not too large for the welfare of the community. The purpose of the study was to examine the relationship of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) as an institutional organization in dealing with disasters and community welfare opportunities in Magelang Regency. This research uses the descriptive qualitative method. The results of the discussion showed that work programs carried out by the Magelang Regency BPBD had a positive effect which could be proven by the number of fatalities that had been declining over the years. The availability of disaster management tools by the National Standard Operating Procedures of the National Disaster Management Agency gives more value to the disaster management process. Besides, various efforts have been made by the government to rebuild affected areas to improve the welfare of affected communities. Good cooperation is needed from various walks of life to minimize the risks of disasters and the welfare of the community that will occur in the future.*

Keywords: *Disaster; Institutional; Welfare*

PENDAHULUAN

Menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Immadudina (2011) mengatakan bahwa bencana merupakan suatu peristiwa di alam yang disebabkan oleh manusia maupun alam yang berpotensi merugikan kehidupan manusia, mengganggu kehidupan normal, serta hilangnya harta dan benda.

Magelang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Letak Kabupaten Magelang yang dikelilingi 5 gunung menyebabkan Kabupaten Magelang menjadi salah satu daerah yang rawan akan bencana. Bukan hanya ancaman bencana vulkanik, namun juga ancaman bencana-bencana lainnya juga seperti angin kencang, gempa bumi, kekeringan dan bencana – bencana lainnya.

Tabel 1. Data Bencana Kabupaten Magelang dan Indikator Kesejahteraan Masyarakat, 2017-2019

No	Keterangan	Jumlah Kejadian		
		2017	2018	2019
1	Jenis Bencana			
	Tanah Longsor	231	209	203
	Angin Kencang	72	105	233
	Kebakaran	23	71	92
	Banjir	6	10	7
	Bencana Lainnya	15	14	45

Kekeringan	3	25	52
Erupsi	0	12	2
Gempa Bumi	1	1	0
Total	352	477	624
2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat			
IPM	68.39	69.11	69.87
PDRB Perkapita	22.22	23.71	25.18
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.5	5.28	5.3

Keterangan: IPM = Indeks Pembangunan Manusia, PDRB = Produk Domestik Regional Broto

Sumber: Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang dan BPS Kabupaten Magelang

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa dalam 3 tahun terakhir, sejak tahun 2017 hingga 2019 bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Potensi bencana yang selalu mengintai Kabupaten Magelang dalam 3 tahun terakhir yaitu bencana tanah longsor. Seperti yang diketahui bahwa di Kabupaten Magelang sendiri banyak bentang alam yang berupa pegunungan dan perbukitan. Memasuki musim penghujan, potensi terjadinya Bencana Tanah Longsor meningkat. Meskipun angka terjadinya bencana-bencana yang lain tidak setinggi Tanah longsor, namun masyarakat dan pemerintah harus tetap perlu waspada terhadap bencana-bencana tersebut.

Bencana dapat menyebabkan perubahan perekonomian dalam masyarakat. Kegiatan yang pada mulanya berjalan dengan lancar dapat terganggu bahkan apabila terjadi bencana yang cukup besar, maka kemungkinan perekonomian dapat lumpuh, sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Menurut (Soetarso, 1980) kesejahteraan social adalah kegiatan-kegiatan terorganisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sejahtera sosial

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui Indek Pembangunan Manusia, Pendapatan Perkapita, dan Pertumbuhan Ekonomi. Apabila ketiganya memiliki pertumbuhan yang bagus, dalam arti dapat tumbuh dengan cepat, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga tinggi.

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Magelang terus meningkat, hal tersebut dibuktikan dengan kenaikan yang terjadi secara terus – menerus selama 3 tahun terakhir. Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang bagus, namun IPM Kabupaten Magelang masih tergolong stagnan dan belum ada perubahan sejak tahun 2010, dimana termasuk dalam kategori sedang. Apabila laju pertumbuhan IPM tinggi, maka dapat dinilai bahwa pemerintah berhasil melakukan pembangunan dengan baik.

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Magelang juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Selama 3 tahun terus menunjukkan kenaikan yang signifikan. Inflasi merupakan salah satu faktor penyebab naiknya nilai PDRB Perkapita di Kabupaten Magelang. Hasil tersebut merupakan perhitungan PDRB Perkapita atas harga berlaku.

Agregat makro lain yang dapat dijadikan sebagai faktor untuk mengukur tingkat kesejahteraan lainnya adalah laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2017-2019 terlihat fluktuatif namun cenderung meningkat. Pertumbuhannya berada pada kisaran diatas 5%, meskipun pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan.

Untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat bencana, maka diperlukan kesiapsiagaan dari berbagai pihak. Kent (1994) berpendapat bahwa kesiapsiagaan yaitu meminimalisirkan akibat-akibat yang merugikan dari suatu bahaya lewat tindakan – tindakan pencegahan yang efektif, rehabilitasi, dan pemulihan untuk memastikan pengaturan serta pengiriman bantuan dan pertolongan setelah terjadi satu bencana secara tepat waktu, tepat, dan efektif. Kesiapsiagaan dianggap penting mengingat kesiapsiagaan sebagai faktor penentu dalam mengurangi risiko bencana yang dapat dilakukan sejak dini (LIPPI-UNESCO/ISDR, 2006).

Penanggulangan bencana dilakukan sejak dini melalui kesiapsiagaan sampai dengan tahap pemulihan sosial, yang menuntut pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama melaksanakan

upaya pengurangan risiko bencana. Peran Lembaga pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya penanggulangan bencana. Lembaga pemerintah dalam hal ini adalah Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai kelembagaan organisasi dalam menghadapi bencana dan peluang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kelembagaan

Istilah kelembagaan dan organisasi hingga saat ini masih diperdebatkan oleh para ahli. Pada umumnya kelembagaan diartikan sebagai suatu institusi ataupun organisasi yang dijadikan sebagai tempat atau wadah. Kelembagaan berasal dari kata Lembaga yang berarti aturan dalam suatu organisasi ataupun kelompok. (Hendropuspito, 1989) dan (Wibowo, 2011) mengatakan bahwa kelembagaan adalah hubungan norma, keyakinan, dan nilai yang tersusun berdasarkan peran, pola dan relasi untuk mencapai kebutuhan – kebutuhan dasar dan merupakan serangkaian Tindakan yang penting dan berulang.

Sementara (Soemardjan & Soemardi, 1964) mengatakan bahwa mereka belum bisa menemukan ahli sosiologi yang dapat menerjemahkan mengenai definisi dari kelembagaan.

Lembaga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Lembaga formal dan Lembaga non formal. Keduanya merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan, namun bedanya dalam Lembaga formal terdapat struktur organisasi yang jelas, tertata dan biasanya bersifat lama. Sementara Lembaga non formal struktur organisasinya masih kurang tertata.

Menurut (Rodrik & Subramaniam, 2003) dalam (Arsyad, 2010) terdapat 4 fungsi Lembaga dalam hal mendukung kegiatan ekonomi:

1. Menciptakan pasar
Lembaga dapat menjamin pelaksanaan kontrak serta melindungi hak kepemilikan.
2. Mengatur pasar
Lembaga memiliki tugas dalam menjaga ketika terjadi kegagalan pasar, seperti ketidaksempurnaan informasi dalam menurunkan biaya transaksi, skala ekonomi dan masalah eksternalitas.
3. Menjaga stabilitas pasar
Lembaga berfungsi untuk mengendalikan inflasi, mengendalikan krisis keuangan dan meminimalkan Ketika terjadi ketidakstabilan harga.
4. Melegitimasi pasar
Lembaga mengelola konflik, mengatur redistribusi, serta memberikan asuransi sebagai bentuk perlindungan sosial.

Saat ini, Lembaga telah mengalami banyak perubahan. Hal tersebut terjadi karena bertambahnya kebutuhan manusia akibat adanya perubahan di berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, maupun politik. (North, 1990) mengungkapkan bahwa terdapat 5 penyebab terjadinya perubahan Lembaga :

1. Interaksi antara Lembaga dan organisasi ketika terjadi secara terus menerus pada saat adanya kelangkaan sehingga terjadi persaingan yang menyebabkan terjadinya perubahan.
2. Persaingan yang menyebabkan Lembaga-lembaga berlomba-lomba untuk berinvestasi agar dapat bertahan hidup.
3. Lahirnya keahlian dan pengetahuan akibat adanya kerangka institusional dianggap dapat menghasilkan hasil yang lebih optimal.
4. Sikap mental pelaku ekonomi yang dapat membangun sebuah persepsi.
5. Perubahan insitusal yang cukup besar akibat adanya eksternalitas jejaring, komplementaritas, dan cakupan ekonomi dari matriks institusional.

2. Kesejahteraan Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana membutuhkan bantuan orang lain untuk melangsungkan kehidupan. Keadaan atau kondisi sejahtera dapat dilihat dari terpenuhi atau tidaknya kebutuhan manusia, baik kebutuhan material maupun non material. Manusia dapat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan material maupun non materialnya dapat seimbang.

Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan warga negara, baik material, spiritual dan maupun sosial, sehingga dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosial. Penyelenggaraan kegiatan sosial dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat secara terarah, terpadu, dan terencana, sementara (Adi, 2005) mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah ilmu yang digunakan untuk mengkaji dan mengelola masalah – masalah sosial. Kualitas hidup dapat ditingkatkan dengan cara mengembangkan ilmu tersebut.

Kesejahteraan sosial di negara maju diselenggarakan oleh pemerintah dan ditujukan oleh masyarakat yang kurang beruntung dalam bentuk bantuan sosial.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan contoh implementasi dari kesejahteraan sosial sebagai sistem organisasi.

Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kembalinya fungsi individu, kelompok, dan masyarakat dalam menjalani hidup merupakan tujuan kesejahteraan sosial. Schneiderman dalam bukunya (Fahrudin, 2012) mengatakan bahwa tujuan dari kesejahteraan adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya kehidupan yang sejahtera sesuai dengan standar kehidupan pokok yaitu pangan, sandang, papan, Kesehatan dan keharmonisan lingkungan.
2. Tercapainya penyesuaian diri antara masyarakat dan lingkungan dengan baik.

Fungsi Kesejahteraan Sosial

(Fahrudin, 2012) dalam bukunya, mengatakan bahwa fungsi kesejahteraan sosial dibagi menjadi 4, yaitu :

1. Fungsi Pencegahan
Fungsi pencegahan dilakukan sebagai upaya untuk mencegah agar sebisa mungkin masyarakat tidak terkena masalah-masalah sosial.
2. Fungsi Penyembuhan
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk membangun Kembali masyarakat yang terkena masalah sosial agar dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Dalam fungsi ini juga terdapat fungsi rehabilitasi yaitu Tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan kembali.
3. Fungsi Pengembangan
Fungsi ini berupa pemberian bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terkena masalah sosial.
4. Fungsi Penunjang
Fungsi penunjang mencakup berbagai aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial.

METODE PENELITIAN

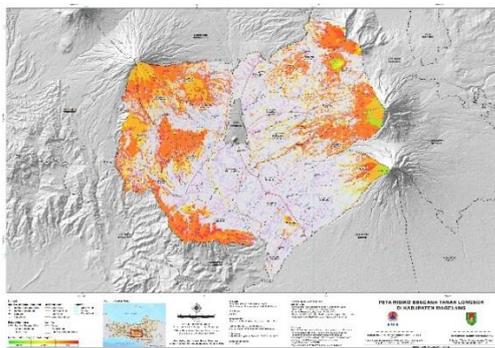
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data kualitatif mencakup data non-numerik. Penelitian ini mendeskripsikan hasil penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti dan hasilnya berupa analisis deskriptif karena data yang digunakan merupakan data kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang hasilnya tidak dapat dicapai dengan prosedur-prosedur statistik (Nugrahani, 2014). Moleong (1997) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan ataupun lisan dari perilaku yang diamati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dengan metode ini dapat mengetahui bagaimana relevansi kelembagaan organisasidalam menghadapi bencana dan peluang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Satuan Kerja perangkat daerah yang menangani kasus bencana, yang kemudian disingkat BPBD Kabupaten Magelang. BPBD Kabupaten Magelang sendiri berdiri sejak tahun 2011. Adanya BPBD diharapkan mampu mengurangi risiko-risiko yang ditimbulkan akibat bencana.

Menurut data tahun 2017 terdapat 352 titik bencana yang tersebar di Kabupaten Magelang, tahun 2018 sebanyak 477 titik bencana, dan tahun 2019 sebanyak 624 titik bencana. Dalam tiga tahun terakhir tersebut, yang cukup menjadi perhatian adalah bencana tanah longsor, angin kencang dan kebakaran, dimana dalam tiga tahun terakhir menempati urutan 3 teratas jumlah kejadian bencana terbanyak di Kabupaten Magelang.

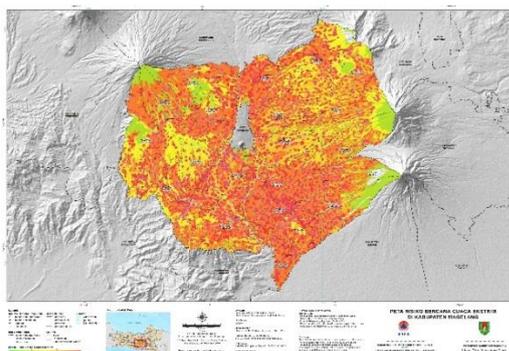
Keberadaan permukiman warga yang berada di pegunungan dan perbukitan menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Magelang berpotensi terjadi bencana tanah longsor, terlebih ketika memasuki musim penghujan. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menjadi pemicu terjadinya tanah longsor.



Gambar 1. Peta Risiko Tanah Longsor
Sumber: Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang

Tanah Longsor merupakan bencana alam yang berpotensi tinggi terjadi di Kawasan Kabupaten Magelang. (Naryanto, 2011) menjelaskan bahwa gaya gravitasi menyebabkan perpindahan massa batuan sehingga terjadi tanah longsor. Gaya penahan dan gaya peluncur yang mengalami gangguan dapat menyebabkan longsor. Beberapa hal yang mempengaruhi Gaya peluncur yaitu kandungan air, berat masa tanah itu sendiri dan beban bangunan. Adanya pengaruh gaya dari luar lereng menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga gaya penahan lebih kecil dari gaya peluncur yang menyebabkan masa tanah bergerak turun.

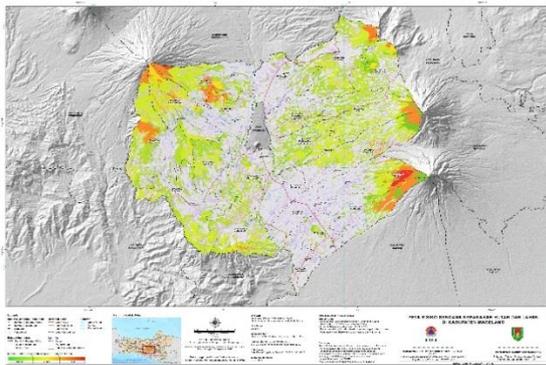
Risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori tinggi, dimana mencapai luas 38.558 hektar. Potensi kerusakan lingkungan juga berada dalam kategori tinggi yaitu mencapai 8.089 hektar. Sementara sebanyak 189.233 jiwa memiliki potensi terpapar risiko bencana. Daerah-daerah yang rawan akan bencana tanah longsor meliputi Kecamatan Windusari, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Salaman, Kecamatan Dukun, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Ngablak, dan daerah daerah di sekitarnya (Magelang B. K.).



Gambar 2. Peta Potensi Cuaca Ekstrem
Sumber: Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang

Hampir semua daerah Kabupaten Magelang berpotensi tinggi terhadap cuaca ekstrim, terutama memasuki musim penghujan yang berpotensi terjadinya Angin Kencang yang kejadiannya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Meskipun kejadiannya tidak dapat diprediksi, namun masyarakat diharapkan tetap waspada, mengingat bahwa cuaca ekstrim dapat memicu terjadinya bencana lain, seperti banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang yang dapat membahayakan masyarakat.

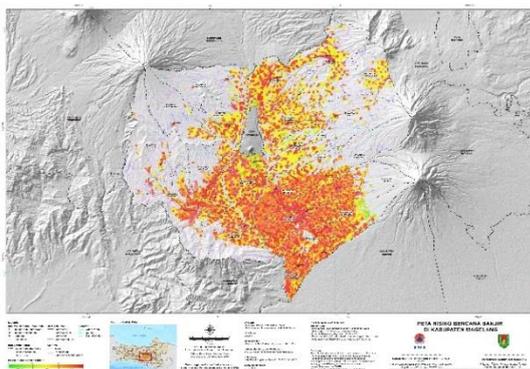
Risiko daerah terdampak cuaca ekstrim di Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu luasnya mencapai 100.122 hektar. Potensi kerugian diperkirakan mencapai 8,14 Triliun dan potensi penduduk yang terdampak mencapai 1.245.544 orang (Magelang B. K.).



Gambar 3. Peta Potensi Kebakaran Hutan
Sumber: Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang

Daerah-daerah yang berpotensi sedang -tinggi akan bahaya potensi bencana kebakaran hutan adalah daerah-daerah lereng gunung berapi. Daerah kawasan lereng Merapi meliputi Kecamatan Dukun dan Srumbung, daerah Kawasan Gunung Merbabu meliputi Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Pakis, Daerah Kawasan Gunung Sumbing meliputi Kecamatan Windusari, Kecamatan Kaliangkrik dan Kecamatan Kajoran, serta Kawasan Gunung Andong dan Gunung Te lomoyo yaitu Kecamatan Ngablak dan Kecamatan Grabag.

Potensi bencana kebakaran hutan luasnya mencapai 45.184 dan hal tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Potensi kerugian fisik dan ekonomi mencapai 171,56 Milyar yang termasuk dalam kategori sedang, sedangkan potensi kerugian lingkungan mencapai 9.721 hektar.

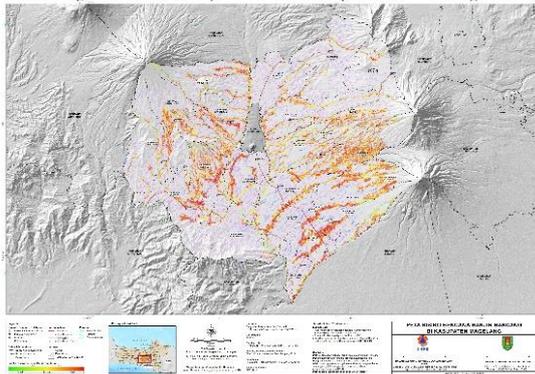


Gambar 4. Peta Risiko Potensi Banjir
Sumber: Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang

Hampir seluruh daerah di Kabupaten Magelang memiliki potensi terkena bencana Banjir, terutama daerah yang terletak di bantaran sungai. Kawasan selatan Kabupaten Magealng memiliki risiki yang lebih tinggi terhadap bencana banjir karena daerah selatan dilewati oleh beberapa sungai, seperti Sungai Progo dan Sungai Elo dimana Ketika terjadi hujan deras dan sungai tidak mampu menampung air hujan, maka akan terjadi nbanjir.

Potensi risiko bencana Banjir mencapai 50.576 hektar dan tergolong dalam kategori tinggi. Potensi kerugian fisik dan ekonomi mencapai 2.21 Triiun dan potensi kerugian kerusakan alam

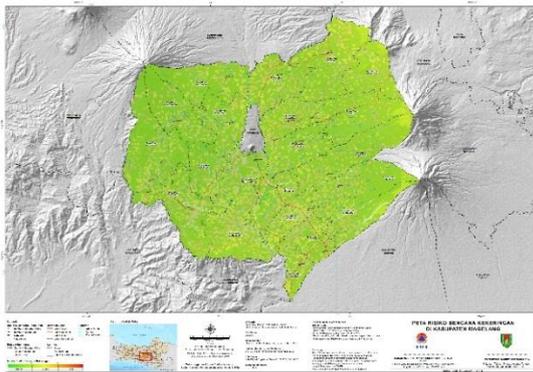
mencaai 887 hektar yang keduanya termasuk dalam kategori tinggi. Sementara potensi penduduk terdampak mencapai 882.662 jiwa.



Gambar 5. Peta Risiko Potensi Banjir Bandang
Sumber: Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang

Banjir bandang terjadi akibat bendungan yang menampung air hujan tidak mampu menahan kapasitas air yang berlebihan. Bendungan tersebut terjadi karena selokan tertutup material tanah dan batu akibat dari longsor yang terjadi di perbukitan akibat hujan yang terjadi secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama.

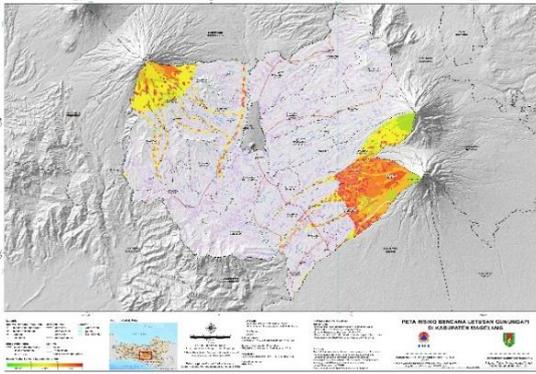
Risiko banjir bandang termasuk dalam kategori tinggi, karena luasnya mencapai 16.840 hektar dan potensi kerugian ekonomi dan sosial mencapai 1,01 triliun rupiah. Sementara untuk potensi penduduk yang terkena risiko banjir bandang mencapai 155.246 jiwa (Magelang B. K.).



Gambar 6. Peta Risiko Potensi Kekeringan
Sumber: Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang

Risiko bencana kekeringan termasuk dalam kategori tinggi yaitu mencapai 107.377 hektar. Potensi kerugian fisik dan ekonomi mencapai 35.07 Milyar dan masuk dalam kategori sedang, potensi kerugian kerusakan lingkungan mencapai 3.713 hektar, termasuk kategori rendah. Sementara potensi penduduk yang terkena risiko mencapai 1.240.247 jiwa. (Magelang B. K.).

Apabila kekeringan tidak dapat ditanggulangi dengan baik, maka dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, mengingat di Indonesia kebutuhan akan pangan masih bergantung pada pertanian tradisional yang masih mengadnalkan iklim dan memanfaatkan air hujan.

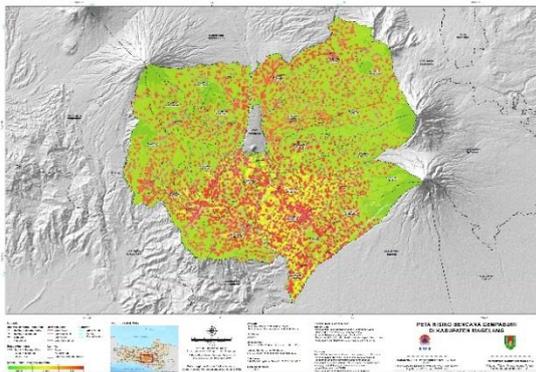


Gambar 7. Peta Potensi Erupsi Gunung Berapi

Sumber: Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang

Daerah yang rawan akan potensi Erupsi Merapi merupakan daerah yang berada di Kawasan gunung berapi, seperti terlihat dalam peta bahwa yang paling rawan merupakan daerah lereng Gunung Merapi dimana gunung tersebut merupakan salah satu gunung yang paling aktif di Indonesia, yang memiliki potensi penduduk yang terpapar bencana erupsi mencapai 76.282 jiwa. Tahun 2010 terjadi letusan yang cukup dahsyat hingga menyebabkan banyak orang meninggal dunia.

Risiko terjadinya Erupsi gunung termasuk dalam kategori tinggi yaitu mencapai 10.212 hektar. Potensi kerugian fisik dan ekonomi mencapai 314,59 Milyar sehingga masuk dalam kategori sedang dan potensi kerusakan lingkungan mencapai 1.87 hektar dan termasuk dalam kategori tinggi (Magelang B. K.).



Gambar 8. Peta Potensi Gempa Bumi

Sumber: Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang

Bencana Gempa bumi merupakan bencana yang tidak dapat di prediksi sebelumnya, untuk itu perlu adanya kewaspadaan setiap saat mengingat Indonesia sendiri merupakan wilayah yang memiliki risiko tinggi terjadinya gempa bumi. Risiko gempa bumi yang terjadi di Kabupaten magelang mencapai luas 107.377 hektar dan termasuk dalam kategori tinggi. Sementara potensi kerugian fisik dan ekonomi mencapai 1,44 Triliun dan termasuk kategori tinggi. Sementara risiko penduduk yang terdampak mencapai 1.270.244 jiwa (Magelang B. K.)

Peran Aktif BPBD

Untuk mengantisipasi bencana – bencana yang terjadi, BPBD telah melakukan berbagai upaya, diantaranya :

1. Memasang Alat Pendeteksi Bencana di Kawasan Rawan Bencana.

Tanah Longsor masih menjadi ancaman utama di wilayah Kabupaten Magelang, terutama di Kecamatan Salaman dan Kecamatan Borobudur, mengingat kondisi geografis dan kontur tanahnya rawan terjadi longsor , untuk mengantisipasi kejadian tanah longsor, BPBD Kabupaten Magelang telah memasang Early Warning System (EWS) sebagai peringatan dini bahaya tanah longsor di berbagai wilayah di Kabupaten Magelang. Cara kerja EWS sendiri

sangat sederhana, EWS akan memberikan sinyal ketika pergerakan tanah sudah mencapai batas, sehingga warga dapat mempersiapkan diri. Wilayah yang sudah terpasang EWS antara lain beberapa wilayah di Kecamatan Salaman, Kecamatan Borobudur, dan Kecamatan Kajoran. Di beberapa daerah di Kabupaten Magelang bahkan ada yang memasang EWS sederhana. Kecamatan Salaman merupakan salah satu daerah yang dipasang EWS sederhana. Cara kerja EWS sederhana cukup sederhana, srine akan berbunyi ketika tali yang terpasang bergerak akibat adanya pergerakan tanah.

2. Melakukan Simulasi Bencana.
 Simulasi bencana dilakukan untuk melatih kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, sehingga Ketika terjadi bencana masyarakat diharapkan tidak panik dan dapat mengetahui apa yang seharusnya di lakukan. Kegiatan simulasi bencana tersebut dilakukan di sekolah-sekolah dan beberapa desa di kabupaten Magelang khususnya yang rawan terjadi bencana.
3. Membangun Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
 Hingga saat ini sudah terdapat 21 Tempat Evakuasi Akhir yang siap diaktifkan Ketika suatu saat terjadi bencana, khususnya Erupsi Gunung Merapi. 21 TEA tersebut tersebar di 6 kecamatan yaitu Srumbung, Salam, Ngluwar, Mungkid, Borobudur dan Muntilan
4. Pembangunan Sister Village.
 Sister Village atau desa bersaudara merupakan Kerjasama antara wilayah yang berpotensi terkena bencana atau Kawasan rawan bencana dengan daerah yang lebih aman. Program tersebut mulai dicetuskan pada tahun 2011, setelah adanya erupsi hebat Gunung Merapi tahun 2010. Hingga saat ini, sudah terdapat 19 pasang Sister Village di Kabupaten Magelang.
5. Pembangunan Desa Tangguh Bencana.
 BPBD mulai merealisasikan Desa Tangguh Bencana Pada tahun 2016 menggunakan dana APBD. Beberapa desa yang menjadi sasaran pembangunan desa tangguh antara lain Desa Ketundan Kecamatan Pakis, Desa Ngablak Kecamatan Ngablak, Desa Girirejo Kecamatan Ngablak, Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik, dan Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan. Membangun masyarakat yang Tangguh bencana merupakan suatu Tindakan yang dapat digunakan masyarakat dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengurangi tingkat kerentanan mereka sendiri, sehingga Ketika terjadi bencana, masyarakat tidak lagi menjadi korban namun dapat menjadi kekuatan dan daya untuk mengurangi risiko bencana.

Dalam upaya penanggulangan bencana juga didukung oleh alat-alat yang memadai, sehingga proses penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan baik. Tabel 2. menunjukkan ketersediaan Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana.

Tabel 2. Ketersediaan Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana

No.	Jenis Peralatan	Keterangan
1	Alat Transportasi	Tersedia alat transportasi meliputi : Mobil operasional, mobil logistic, mobil rescue, truk dapur umum, truk serbaguna, motor trail, tangka air, motor trail, dan motor bebek
2	Alat Bengkel	Alat yang tersedia meliputi : gergaji,
3	Alat Ukur	Alat yang tersedia meliputi : Kompas, meteran roll, dan teropong
4	Alat Pertanian	Alat yang tersedia meliputi : Pompa air, cangkul, skop, dan selang
5	Alat Perlindungan	Alat yang tersedia meliputi tenda yang terdiri dari tenda peleton, tenda regu, tenda keluarga dan tenda posko dan tenda pengungsi serta alat perlindungan diri bagi relawan yang terdiri dari jas hujan, helm safety, boot, dan head lamp evakuasi
6	Alat Komunikasi dan Elektronik	Alat yang tersedia meliputi HT

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang

Peralatan-peralatan tersebut berguna untuk memperlancar proses evakuasi bencana, sehingga harus dipastikan berfungsi dengan baik. Untuk alat – alat berat seperti Beco dan Buldozer belum tersedia di BPBD Kabupaten Magelang dan diharapkan segera memiliki alat-alat tersebut. Selain peralatan-peralatan di atas, juga tersedia peralatan kesehatan yang berfungsi sebagai pertolongan pertama sebelum adanya tim medis atau pihak yang berwenang lainnya.

Seiring berjalannya waktu, BPBD terus menunjukkan keberhasilannya dalam upaya penanggulangan bencana. Keberhasilan tersebut didukung oleh faktor internal faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang diciptakan oleh tim BPBD tersebut yaitu dilihat dari keberhasilan dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan, yang didukung oleh semakin kuatnya koordinasi yang dibangun antar pemangku kepentingan, realisasi pembagian kerja di lapangan dalam pemnanggulangan bencana dapat terlaksana dengan baik, komunikasi internal yang terjalin dengan baik, serta kecepatan dan ketepatan petugas di lokasi penanggulangan bencana. Sementara faktor eskternal meliputi Kerjasama dari berbagai pihak termasuk masyarakat yang semakin sadar mengenai bahaya bencana.

Tabel 3. Korban Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019

No	Kondisi	Jumlah Korban		
		2017	2018	2019
1	Meninggal Dunia	18	9	12
2	Luka Berat	1	1	1
3	Luka Ringan	16	18	12
4	Hilang	1		
Total		36	28	25

Sumber: SIKK BPBD Kabupaten Magelang

Selama 3 tahun terakhir, secara keseluruhan terjadi penurunan jumlah korban bencana. Penurunan jumlah korban bencana setiap tahunnya merupakan salah satu bukti keberhasilan BPBD serta pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana.

Hubungan Bencana dan Kesejahteraan

Terjadinya bencana meninggalkan dampak bagi masyarakat, baik dampak ekonomi, maupun sosial. Dampak yang terjadi akibat bencana antara lain terjadi kerusakan berbagai fasilitas publik maupun swasta. Banyak bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan bahkan hingga hancur, seperti perusahaan, hotel, swalayan, pabrik dan bangunan lainnya. Ketika banyak bangunan yang mengalami kerusakan maka pemilik perusahaan tidak akan beroperasi, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian utamanya. Selain para pegawai, para pelaku ekonomi pada sektor lainnya juga menerima dampaknya, seperti petani yang gagal panen, dan para wirausaha yang tidak dapat melakukan kegiatan produksi karena tidak tersedianya bahan baku. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian output yang tidak dihasilkan, namun juga dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Akibat bencana tersebut, perekonomian masyarakat menjadi lesu, padahal mereka juga harus tetap melanjutkan kehidupan sejalan dengan bencana yang sedang dihadapi. Dalam jangka Panjang, apabila hal tersebut tidak segera diatasi, maka yang terjadi adalah kesejahteraan masyarakat menurun dan akan terjadi kemiskinan. Kemampuan masyarakat dalam meyisihkan pendapatan dapat digunakan untuk melihat setinggi mana tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan bencana, terdapat 3 tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah, khususnya BPBD, yang bertujuan untuk meminimalisir risiko yang terjadi, yaitu :

1. Tahap Pra Bencana.

Tahap ini dilakukan sebelum atau pada saat tidak ada bencana. Hal-hal yang dapat dilakukan meliputi qkesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana

2. Tahap Tanggap Darurat.

Tahap ini dilakukan pada saat terjadinya bencana. Tahapan ini focus pada penyelamata korban jiwa dan harta benda, menangani kerusakan dan kehancuran, serta membuat posko darurat. Selain itu juga diberikan bantuan logistic untuk korban.

3. Tahap Pasca Bencana.

Tahapan yang dilakukan setelah terjadi bencana, yaitu dapat berupa pemulihan, rekonstruksi dan rehabilitasi.

Melihat dampak-dampak yang terjadi akibat bencana, pemerintah berkewajiban menanggulangi bencana dan memulihkan Kembali perekonomian pasca bencana. Syarat keberhasilan dari minimalisir dampak bencana adalah respon yang cepat dalam menanggapi bencana. Namun sebenarnya penanganan bencana yang preventif dianggap lebih efisien daripada penanganan bencana yang bersifat responsive. Dapat dikatakan bahwa untuk meminimalisir dampak bencana, dapat dilakukan melalui pembekalan kepada masyarakat mengenai kebencanaan.

Setelah berakhirnya fase darurat, untuk memperbaiki perekonomian masyarakat, diperlukannya distribusi sumber daya dari pemerintah. BPBD bersama dinas terkait memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, dan sejumlah uang meskipun jumlahnya hanya terbatas. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari selama berada di posko bencana. Selain itu, juga dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembangunan pemukiman sementara.
Pembangunan hunian sementara dianggap hal terpenting, karena dengan memiliki tempat tinggal, masyarakat dapat memikirkan bagaimana kehidupan kedepannya.
2. Pemberian permodalan.
Pemberian permodalan dapat diberikan dalam bentuk hibah ataupun peminjaman. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat, khususnya yang tidak memiliki cadangan dana. Adanya bantuan permodalan tersebut diharapkan masyarakat mampu melanjutkan kehidupan dan dapat menghilangkan ketergantungan.
3. Pelatihan wirausaha.
Pelatihan wirausaha menjadi alternative dalam upaya pembangunan perekonomian pasca bencana, terutama untuk masyarakat yang terpaksa harus kehilangan penghasilan utamanya
4. Pendekatan mental agar korban dapat menghilangkan rasa trauma.
Kesehatan baik jasmani ataupun rohani menjadi faktor penting dalam kegiatan perekonomian. Ketika seseorang memiliki jiwa dan raga sehat maka tingkat produktivitas menjadi tinggi, sehingga dapat memulihkan keadaan ekonomi yang terpuruk.
5. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat.
Kegiatan tersebut tumbuh dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat berdasarkan rasa senasib sepenanggungan dan rasa ikatan kekeluargaan. Dalam kegiatan tersebut diharapkan masyarakat mampu saling bekerjasama dan saling percaya, sehingga dapat tumbuh rasa kemandirian dan kewaspadaan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

BPBD Kabupaten Magelang berdiri sejak tahun 2011. Adanya BPBD diharapkan mampu mengurangi risiko-risiko yang ditimbulkan akibat bencana. Menurut data tahun 2017 terdapat 352 titik bencana yang tersebar di Kabupaten magelang, tahun 2018 sebanyak 477 titik bencana, dan tahun 2019 sebanyak 624 titik bencana. Keberadaan permukiman warga yang berada di pegunungan dan perbukitan menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Magelang berpotensi terjadi bencana tanah longsor, terlebih ketika memasuki musim penghujan. Selain faktor – faktor alam, faktor manusia juga dapat menjadi pemicu terjadinya tanah longsor.

Peran BPBD dalam menghadapi bencana diantaranya memasang alat pendeteksi bencana di Kawasan rawan bencana, melakukan simulasi bencana, membangun Tempat Evakuasi Akhir (TEA), Pembangunan Sister Village dan Pembangunan desa Tangguh bencana.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun Kembali perekonomian masyarakat antara lain, pembangunan pemukiman sementara, pemberian permodalan, pelatihan wirausaha,

pendekatan mental agar korban dapat menghilangkan rasa trauma serta pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, peran pemerintah, dinas terkait, serta masyarakat sudah cukup baik, namun tetap perlu adanya peningkatan Kerjasama dan koordinasi, sehingga upaya penanggulangan bencana dapat lebih maksimal dan dapat tercapai visi Kabupaten Magelang yang SEMANAHAH (Sejahtera, Maju, dan Amanah).

DAFTAR PUSTAKA

- A P Wibowo. (2011). *Pengembangan Kelembagaan Lokal*. Management Studio and Clinic.
- Asy, Q. (2018). *Di Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Banjir , Longsor dan Kekeringan di Pamekasan 2007)*. 1(2), 153–168.
- Aurellia Chintia Deby H, Yaqub Cikusin, R. P. W. (2019). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Tahap Kesiapsiagaan (Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu). *Jurnal Respon Publik Volume 2019*, 13(3), 34–41.
- Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang. (n.d.). *No Title*.
<https://sikk.bpbdmagelang.id/>
- Bencana, D. (2011). *Dampak Ekonomi Makro Bencana : 2011*(semnasIF), 67–74.
- Bencana, R. (2018). *Strategi Penanggulangan Resiko Bencana Pada Badan Disaster Risk Management Strategy In Buton District Disaster*. 1(1), 1–8.
- Berkala, T., Nasional, B., Penanggulangan, N., & Bencana, P. (2012). *Jurnal penanggulangan bencana*. 3.
- D North. (1990). *Institution, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University.
- D Rodrik, S. A. (2003). *The Primacy Institution (and what this does and does not mean)*.
- F Nugrahani. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Galih Marlyono, S., & Kamil Pasya, G. (2016). Peranan Literasi Informasi Bencana Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Masyarakat Jawa Barat. *Gea. Jurnal Pendidikan Geografi*, 16(2), 116–123.
- H, A. C. D., Cikusin, Y., W, R. P., Publik, J. A., Admiministrasi, F. I., Malang, U. I., Mt, J., Malang, H., Unisma, L., Mt, J., & Malang, H. (2019). *Dalam Tahap Kesiapsiagaan (Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu)*. 13(3), 34–41.
- Hendropuspito. (1989). *Sosiologi Semantik*. Kanisius.
- Ilham, H. (2019). *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial, Edisi I, November 2018 ISSN: 2655-0911*. November 2018, 1–19.
- Immamudina, A. (2011). *Zonasi risiko bencana banjir akibat sea level rise*.
- Indriasari, F. N. (2018). Pengaruh Pemberian Metode Simulasi Siaga Bencana Gempa Bumi terhadap Kesiapsiagaan Anak di Yogyakarta. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 11(3), 199.
<https://doi.org/10.20884/1.jks.2016.11.3.700>
- Koentjoroningrat. (1994). *Kebudayaan, Mentalis, dan Pembangunan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kunci, K., Sosial, K., & Sosial, P. (2009). *Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. 45–58.
- Kurniyanti, M. A. (2012). Peran Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Manajemen Bencana (Disaster Management). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 1(1), 85–92.
<https://doi.org/10.33475/jikmh.v1i1.87>
- Lincolin Arsyad. (2010). *Institusi, Biaya Transaksi, dan kinerja ekonomi: Sebuah Tinjauan Teoriti*.
- LIPPI-UNESCO/ISDR. (2006). *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami*. Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumihan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Moelong. (1997). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya P.
- Nafinuddin, S. (n.d.). *Pengantar semantik (pengertian, hakikat, jenis)*.

- Naryanto, H. S. (2011). *No Title*. 13(2), 74–81.
- Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (n.d.). PT Refika Aditama.
- Prasanti, D., & Fuady, I. (2017). Strategi Komunikasi Dalam Kesiapan Menghadapi Bencana Longsor Bagi Masyarakat Di Bandung Barat Studi Kasus Tentang Strategi Komunikasi Dalam Kesiapan Menghadapi Bencana Longsor Bagi Masyarakat Kawasan Pertanian Di Kaki Gunung Burangrang, Kab.Bandung B. *Jurnal Komunikasi*, 11(2), 135.
<https://doi.org/10.21107/ilkom.v11i2.3329>
- Purnama, A., & Murdiyanto. (2013). Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam Studi Kasus Pemulihan Kehidupan Korban Bencana Alam di Kota Jayapura. *Jurnal PKS*, 12(2), 183–196.
- Raja, Z. D. G., Hendarmawan, & Sunardi. (2017). Upaya Pengurangan Risiko dan Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Ancaman Bencana Tanah Longsor (Desa Ndito, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Lingkungan Dan Bencana Geologi*, 8(2), 103–116. <http://jlbgeologi.esdm.go.id/index.php/jlbg>
- Rusli, R., & 'Ulya, A. F. (2018). Peran Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana (Studi Manajemen Bencana). *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.18860/jpips.v5i1.7327>
- Soemardjan dan Soemardi. (1964). *Setangkai Bunga Sosiologi (Kumpulan Tulisan)*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sunarti, V. (2014). Peranan Pendidikan Luar Sekolah Dalam Rangka Mitigasi Bencana. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 2(2). <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v2i2.5044>
- Syamsuddin AB, S. D. (2018). Peran Anggota Tagana Terhadap Penanggulangan Bencana Di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Kabupaten Gowa. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 1. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jmks/article/view/7006/5785>
- Widodo, Y. B. (2016). Dampak Bencana Kekeringan Terhadap Peluang Kesejahteraan Penduduk. *Populasi*, 18(1). <https://doi.org/10.22146/jp.12076>
- Yayat Supriyatna. (2011). Analisis Dampak Bencana Terhadap Perekonomian Indonesia Dengan Pendekatan SNSE. *Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 18.
- Yustisia, N., Aprilatutini, T., & Utama, T. A. (2019). Pengaruh simulasi menghadapi bencana gempa bumi terhadap kesiapsiagaan siswa SDN 86 kota Bengkulu. *Journal of Nursing and Public Health*, 7(2), 32–38.